

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan wilayah dalam pembangunan pertanian selama ini baru sebatas konsep dan belum mampu diimplementasikan secara riil. Berbagai bentuk dan model yang ditetapkan sebagai bentuk kebijakan pembangunan pertanian yang menggunakan pendekatan wilayah, ternyata belum mampu membuktikan bahwa indikator pendekatan wilayah telah ada dan dilakukan pada wilayah pertanian tersebut.

Pada prinsipnya pembangunan wilayah lebih ditekankan kepada memanfaatkan sifat keadaan daerah dan lokal terutama aspek yang menyangkut sumberdaya fisik dan sosiokultural yang hidup di masing-masing wilayah (Anwar, 1989). Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis antara satu wilayah sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, maka upaya pembangunan dapat dilakukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan terhadap penetapan suatu kawasan menjadi pusat/sentra aktifitas/produksi bagi kegiatan pertanian maupun aktifitas non pertanian/ ekonomi lainnya, secara teoritis langsung bermula pada pemikiran para ahli ekonomi regional terutama teori lokasi. Pelopor teori lokasi terkemuka yang merupakan salah seorang ahli teori lokasi berasal dari Jerman, yakni Von Thunen (1851); membahas tentang analisa lokasi kegiatan pertanian berdasarkan fakta yang terdapat di Eropa. Teori ini dikembangkan selanjutnya oleh William Alonso (1964) sebagai landasan teori penggunaan lahan (*land-use*) di daerah perkotaan. Kemudian, pada waktu revolusi industri di Jerman mulai berkembang, muncul Alfred Weber (1929) yang menulis buku tentang teori lokasi industri dengan mengambil kasus pemilihan lokasi pendirian pabrik besi baja untuk memenuhi permintaan industri kereta api. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Edgar Hoover (1948) dan Leon N. Moses (1958). August

Losch (1954) juga melakukan analisa lokasi perusahaan berdasarkan konsentrasi permintaan dan persaingan antar wilayah (*Spatial competition*). Teori ini selanjutnya dikembangkan pula oleh Grennhut dan Ohta (1975) ke dalam kerangka analisa yang lebih luas tentang teori harga spasial dan areal pasar (Sjafrizal, 2008).

Dari beberapa ahli yang disebutkan diatas, maka pemikiran Von Thunen yang menjadi pelopor teori lokasi terkait dengan wilayah pertanian menjadi dasar pemikiran terbentuknya suatu pendekatan wilayah dalam pembangunan pertanian. Von Thunen mengembangkan konsep lahan secara spasial dengan mengkaitkan letak lokasi lahan terhadap pusat pemasaran produksi. Tanah yang dekat dengan pusat pemasaran produksi akan memberi keuntungan yang lebih tinggi karena biaya transportasinya lebih murah. Kepentingan ekonomi mendorong penggunaan lahan, Doebele (1982) melihat bahwa manusia senantiasa melakukan suatu investasi tertentu terhadap sebidang lahan dengan harapan terjadi nilai tambah akibat investasi. Pada umumnya besaran “nilai tambah” dari berbagai kegiatan dapat diurutkan; kegiatan industri > perdagangan > pemukiman > pertanian intensif > pertanian ekstensif. Burgess (1925) mengamati bahwa kegiatan yang mampu memberikan keuntungan yang tinggi akan menempati lokasi utama (*prime location*), sebagai akibat perbedaan nilai surplus lahan karena perbedaan kesuburan dan karena perbedaan kualitas lokasi dan jarak dari pasar.

Pemikiran tersebut selanjutnya menjadi dasar berkembangnya konsep-konsep pembangunan pertanian dengan model pendekatan wilayah, antara lain yakni;¹ Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Agropolitan dan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET).

¹ Kebijakan pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah dengan model KSP dan KAPET mulai dilaksanakan pemerintah di Indonesia sejak tahun 1999 yang dilaksanakan melalui BAPPENAS, dimana KSP diterapkan untuk kegiatan ekonomi dengan pertanian sebagai kegiatan utama, sedangkan KAPET untuk kegiatan yang lebih besar dan melibatkan sektor industri disamping pertanian. Prinsipnya keterpaduan antar sektor dan wilayah pada KSP adalah sama dengan KAPET, yakni berkaitan dengan *core business*, dikaitkan dengan komoditi unggulan yang ada didaerah bersangkutan. Namun penerapan kedua konsep ini hanya berjalan secara lancar selama 3 (tiga) tahun yakni sampai tahun 2001. Selain kedua model pembangunan tersebut juga ada pembangunan Kawasan Kota Tani (Agropolitan), Kawasan Masyarakat Industri Perkebunan (KIMBUN).

Pendekatan KSP merupakan salah satu pendekatan pembangunan pertanian yang didasarkan kepada teori pembangunan ekonomi wilayah dengan subansi pokok diantaranya:

- a. sebagai upaya mendorong percepatan hasil produksi pertanian
- b. keterpaduan pembangunan daerah melalui perwilayahan komoditas,
- c. sinergi dalam kawasan budidaya yang memiliki potensi baik dari segi aspek fungsional, spasial, waktu, finansial dan pengolahan (Sinergi antar aktifitas produksi hasil pertanian)
- d. sistem agribisnis yang dapat memberikan nilai tambah mulai dari hulu sampai dengan hilir hingga komoditas/produk pertanian sampai ke konsumen.
- e. memperoleh investasi pemerintah/swasta/masyarakat, yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut
- f. implementasinya dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota

Perkembangan Kawasan Sentra Produksi cukup gencar dilakukan pemerintah pada awal reformasi sebagai bentuk nyata upaya ketahanan pangan dalam pembangunan pertanian nasional. Namun kenyataannya banyak Kawasan Sentra Produksi terutama KSP Pangan tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai contoh ada 7 (tujuh) KSP di Provinsi Riau, akan tetapi saat ini tidak berjalan sesuai rencana awal tujuan terbentuknya KSP. Beberapa penelitian terkait KSP di Indonesia yang pernah dilakukan tentang Kawasan Sentra Produksi (KSP) membahas tentang kesesuaian lahan, program pengembangan kawasan KSP (Stiawan, 2000); identifikasi pengembangan KSP (Faperta dan Kehutanan UNHAS, 2000); partisipasi masyarakat pada pengembangan KSP (Tim Studi P4W-IPB, 2001); jalur angkutan komoditi pertanian (Muhammad, 2005); pendapatan petani dan harga tanah (Mulyani, 2007); dan indeks keberlanjutan KSP (Iswari, 2008). Selain itu, penelitian Kemal (dalam Prismuladi, 2006), tentang sentra produksi ayam ras petelur di kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa sentra produksi memberikan keuntungan kepada peternak berupa keuntungan skala, lokalisasi dan fasilitas bersama setelah mereka berkelompok. Namun apakah keuntungan atau manfaat peningkatan hasil tersebut benar disebabkan oleh keberadaan di lokasi sentra atau keuntungan yang

diperoleh tidak ada bedanya bila tidak berada pada lokasi sentra, hal tersebut tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Pembangunan pertanian selama ini cenderung hanya menjadi pembangunan sektoral, sehingga hal ini menjadi indikasi belum dilaksanakannya konsep pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah secara nyata, karena dalam pembangunan dengan pendekatan wilayah maka aspek sinergi antar sektor dan antar aktifitas ekonomi menjadi suatu keharusan.

Memang pada dasarnya, dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni pendekatan sektoral dan regional/wilayah.² Pembangunan daerah (*regional development*) selama ini sebenarnya merupakan pembangunan sektoral di daerah, dan menjadi salah satu penyebab kesenjangan antar wilayah dan cermin kegagalan koordinasi dan keterpaduan dalam pembangunan wilayah. Pendekatan sektoral yang diharapkan dapat membentuk keterkaitan (*linkaged*) ternyata telah menumbuhkan “ego sektoral” yang juga menyebabkan ketimpangan sektoral.

Pendekatan pembangunan demikian yang berjalan selama ini hanya mementingkan kepentingan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga (sebagaimana pendapat Kartasasmita, 1996; Bryant dan White, 1989) hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat sampai lapisan terbawah (*trickle-down effect*) yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) ternyata tidak terwujud bahkan yang terjadi adalah semakin melebarnya kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk itu maka pendekatan pembangunan yang dibutuhkan adalah dengan strategi pola keterpaduan dari bawah ke atas (*bottom up strategy*) dan dari atas ke bawah (*top down strategy*). Tentunya dengan memberikan porsi yang lebih besar pada perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*), karena dianggap lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat dan semangat pemerintahan desentralisasi.

Pendekatan pembangunan yang sektoral cenderung tidak memiliki keterpaduan (sinergi dengan sektor lainnya) dan karena itu juga mempunyai

² Pendekatan sektoral merupakan pendekatan pembangunan dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor yang ada dalam kegiatan ekonomi pada suatu wilayah, sedangkan pendekatan regional lebih fokus kepada pemanfaatan ruang serta interaksinya dalam kegiatan dalam ruang wilayah tersebut (Tarigan, 2004).

tingkat efisiensi yang rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi pokok pikiran mengapa pembangunan dengan pendekatan sektoral kurang efisien dibandingkan pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan wilayah adalah:

1. Lokasi kegiatan tidak diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan sektoral, hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan bagi kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan lokasi. Artinya, keuntungan lokasi tidak dapat diserap secara optimal (pemasaran /transportasi jarang menjadi perhatian)
2. Keuntungan aglomerasi tidak dapat diserap, karena keterkaitan dengan sektor lainnya juga tidak menjadi perhatian.

Karena itu, sesuai dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah maka perubahan paradigma harus dilakukan, sehingga pendekatan pembangunan wilayah dapat benar-benar mampu memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya daerah bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan pertanian merupakan arah utama pembangunan ekonomi Indonesia saat ini, upaya peningkatan peran sektor pertanian dalam ekonomi agraris melalui kebijakan pertanian yang kondusif terus dilakukan pemerintah, berbagai program dan kebijakan yang diimplementasikan diarahkan bagi aglomerasi dalam pengembangan komoditas pertanian. Dalam proses ini seharusnya yang terjadi adalah tipe aglomerasi yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan kedepan (*forward linkage*). Keterkaitan ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan pembangunan wilayah, karena keterkaitan yang tinggi tidak hanya berarti mencerminkan ragam aktivitas ekonomi dan pembangunan yang dinamis, tetapi juga lebih jauh, mengindikasikan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Nugroho dan Dahuri, 2004). Namun kenyataan empiris menunjukkan hal itu belum terealisasi dengan baik.

Selama beberapa periode, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional (PDB) Indonesia mengalami penurunan, dari sekitar 50 persen pada tahun 1960, 40 persen pada tahun 1969, menjadi 20,2 persen pada tahun 1988, menjadi 17,6 persen pada tahun 1993, selanjutnya menjadi 17,2 persen pada tahun 1996, hanya 14,9 persen pada tahun 1997, dan terus

mengalami penurunan secara absolute. Walaupun sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif (0,26 persen) diantara kondisi pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 14 persen pertahun pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Dan selanjutnya pada tahun 2012 pertumbuhan sektor pertanian hanya 4,20 persen yang turun lagi menjadi 3,54 persen pada tahun 2013 . Selanjutnya, dilihat dari sisi lapangan pekerjaan penduduk Indonesia pada tahun 2010, maka penduduk terbanyak bekerja masih disektor pertanian sebesar 39,88 persen penduduk Indonesia (42,83 juta orang). Disusul sektor perdagangan sebesar 20,68 persen (22,21 juta orang), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 14,54 persen (15,62 juta) (Saragih, 1997; BPS, 2011; Deptan, 2014).

Pentingnya Kawasan Sentra Produksi tetap menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian Indonesia kedepan. Sebagai contoh KSP Pangan sebagai lumbung pangan nasional dengan produksi padi nasional 61,87 juta ton tahun 2011, diharapkan dapat meningkat menjadi 64,41 juta ton pada tahun 2045 (deptan, 2014), peran KSP pangan lainnya juga sangat penting dalam pembangunan pertanian guna mendukung strategi pembangunan nasional tersebut.

Pemerintah provinsi Sumatera Barat Selain dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2015, mengembangkan Kawasan Sentra Produksi yang telah ada di daerah ini. Pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pertanian mengembangkan kawasan sentra produksi (KSP) pertanian pada tahun 2013 dengan didanai APBD sebesar Rp1,93 miliar. Pengembangan KSP pertanian tersebut dilaksanakan pada unit-unit KSP yang telah ada sebelumnya dan dinilai berpotensi untuk berkembang usahanya. Pada tahun 2013 Sumbar juga mengembangkan KSP dengan anggaran Rp. 4 miliar, dan dana mencapai Rp. 4,73 miliar pada tahun 2015.

Sektor Pertanian merupakan potensi utama di wilayah provinsi Sumatera Barat. Salah satu daerah Kabupaten yang memiliki potensi pertanian tersebut adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010-2015 yaitu pada misi ke 4 adalah mewujudkan dinamisasi gerak sektor agraris, dalam kebijakan ini jelas

mengarahkan perlunya pembangunan kawasan sentra produksi pertanian terutama pangan.

Tabel 1. Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Dinamisasi Gerak Pembangunan Sektor Agraris Tahun 2010-2015

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat melalui penyediaan pangan yang cukup dalam kerangka beragam bergizi, dan berimbang	Mendorong percepatan pengembangan penganekaragaman pangan dan penerapan sistem kewaspadaan pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan utama dan pengembangan pangan non padi Penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang terintegrasi lintas sektor
Terwujudnya pengembangan kawasan sentra produksi produk agraris dalam kerangka "one village one product" .	Berkembangnya basis perekonomian daerah yang terspesialisasi berdasarkan kompetensi dan potensi masing-masing wilayah	Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi berdasarkan jenis komoditas dan spesifikasi wilayah.	Menetapkan komoditas unggulan daerah dan kawasan-kawasan sentra produksinya . Meningkatkan kapasitas pelaku pertanian dari skala usaha menjadi industri
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan industri agraris yang efisien dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan sektor pertanian	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk agro industri. Mendorong peningkatan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produksi produk agraris Mendorong peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan produk dan pemasaran industri agraris daerah.	Meningkatkan kualitas penyuluhan pertanian dan sosialisasi serta diseminasi teknologi pertanian dan industri produk agraris Meningkatkan aktifitas dan efektifitas lembaga keuangan dalam meningkatkan akses modal. Meningkatkan kinerja asosiasi pertanian, perdagangan, perindustrian, kelompok tani dan koperasi daerah.
Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pasar industri produk agraris	Berkembangnya diversifikasi produk perekonomian masyarakat yang berdaya saing di pasar bebas	Pengembangan indikasi Geografis produk agraris Kabupaten Lima Puluh Kota	Meningkatkan jumlah produk agraris berindikasi produk lokal Meningkatkan produksi dan promosi produk agraris berindikasi produk lokal
Terwujudnya pengembangan industri produk agraris yang mengedepankan kelestarian sumber daya alam	Meningkatnya cakupan dan produktifitas produk agribisnis berbasis kelestarian SDA	Mendorong peningkatan produksi dan pemasaran produk agraris organik dan hasil hutan	Penetapan produk organik dan kawasan pengembangannya

Sumber : Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015

Sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan indikator makro Produk Domestik Regional Bruto, maka peran sektor ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha atas harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2010 hingga 2014.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan	2.658.593,7	2.814.162,7	2.898.688,4	3.009.406,3	3.158.338,9
2	Pertambangan dan Penggalian	536.881,6	571.870,2	615.913,5	665.106,6	698.559,4
3	Industri Pengolahan	584.277,9	612.340,9	659.337,5	693.508,4	732.585,9
4	Pengadaan Listrik	1.012,7	1.081,5	1.170,7	1.198,7	1.327,7
5	Pengadaan Air	2.094,2	2.236,4	2.254,4	2.423,0	2.577,6
6	Konstruksi	277.722,3	305.159,7	335.604,0	372.138,7	399.253,8
7	Perdagangan Besar	933.778,4	985.273,2	1.081.308,8	1.168.257,5	1.247.215,2
8	Transportasi dan Pergudangan	538.085,7	583.215,9	633.456,2	698.048,5	766.787,7
9	Penyediaan Akomodasi	37.874,5	40.488,0	43.376,5	45.567,4	47.960,8
10	Informasi dan Komunikasi	287.410,6	320.650,0	358.796,2	396.701,3	433.497,1
11	Jasa Keuangan	111.336,1	120.473,0	132.342,3	140.180,7	147.764,1
12	Real Estate	80.219,6	84.924,2	89.237,2	94.614,1	100.530,5
13	Jasa Perusahaan	2.007,8	2.139,7	2.273,8	2.432,0	2.591,8
14	Administrasi Pemerintah	420.507,7	449.878,9	455.802,5	468.041,6	478.164,5
15	Jasa Pendidikan	156.872,7	167.815,7	183.153,6	198.397,2	214.211,1
16	Jasa Kesehatan	83.254,3	89.900,6	98.346,1	104.425,1	112.484,2
17	Jasa lainnya	73.606,5	78.756,0	83.969,1	89.497,2	95.761,0
	Jumlah	6.785.536,27	7.230.366,7	7.675.030,8	8.149.944,3	8.639.611,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat kontribusi terbesar struktur ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2014 disumbangkan oleh sektor pertanian, kehutanan yaitu menyumbang sebesar Rp.3.158.338,900,- kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar yaitu menyumbang sebanyak Rp.1.247.215,200,-. Dengan total PDRB pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp.8.639.611,400,-

Tetapi bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per sektor selama 5 tahun terakhir, maka sektor pertanian cenderung mengalami penurunan pada tahun 2010-2013, dan dengan dilaksanakannya kebijakan pembangunan pertanian yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat peningkatan pertumbuhan sector pertanian pada tahun 2015.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2010–2014 (persen)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan	6,14	5,85	3,00	3,82	4,95
2	Pertambangan dan Penggalian	6,27	6,52	7,70	7,99	5,03
3	Industri Pengolahan	4,25	4,80	7,67	5,18	5,63
4	Pengadaan Listrik	6,80	6,80	8,25	2,40	10,76
5	Pengadaan Air	6,27	6,79	0,80	7,48	6,38
6	Konstruksi	10,09	9,88	9,98	10,89	7,29
7	Perdagangan Besar	5,28	5,51	9,75	8,04	6,76
8	Transportasi dan Pergudangan	6,29	8,39	8,61	10,20	9,85
9	Penyediaan Akomodasi	5,26	6,90	7,13	5,05	5,25
10	Informasi dan Komunikasi	11,33	11,57	11,90	10,56	9,28
11	Jasa Keuangan	7,48	8,21	9,85	5,92	5,41
12	Real Estate	5,97	5,86	5,08	6,03	6,25
13	Jasa Perusahaan	6,57	6,57	6,27	6,96	6,57
14	Administrasi Pemerintah	6,46	6,98	1,32	2,69	2,16
15	Jasa Pendidikan	5,88	6,98	9,14	8,32	7,97
16	Jasa Kesehatan	4,58	7,98	9,39	6,18	7,72
17	Jasa lainnya	5,03	7,00	6,62	6,58	7,00
Jumlah		6,24	6,56	6,15	6,19	6,01

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 10,76 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor administrasi pemerintahan yaitu 2,16 persen.

Berkaitan dengan paparan diatas, maka pembangunan sektor pertanian dengan pendekatan wilayah dalam pengembangan kawasan sentra produksi pertanian seharusnya berjalan secara terintegrasi dan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Namun kenyataannya aktifitas tersebut masih berjalan secara parsial sehingga keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dalam aktivitas perekonomian wilayah belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak kawasan sentra produksi tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan. Artinya sinergi dan keterpaduan fungsional antar sektor yang diharapkan terjadi dengan pembentukan Kawasan Sentra Produksi belum mampu direalisasikan, salah satu kawasan sentra produksi yang masih berjalan saat ini adalah kawasan sentra produksi ternak unggas di

Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya akan menjadi lokasi penelitian ini.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang berkaitan dengan pendekatan wilayah dalam pembangunan pertanian. Pemahaman terhadap hal tersebut dilakukan melalui dua hal, yaitu pertama dengan fokus penelitian pada Kawasan Sentra Produksi sebagai bentuk aglomerasi dalam pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah (*regional approach*). Dan berikutnya dengan fokus kebijakan pembangunan pertanian dengan pelaksanaan sinergi dan keterkaitan antar sektor dalam pembangunan wilayah.

B. Perumusan Masalah

Konsep pembangunan wilayah berbeda dengan konsep pembangunan sektoral, karena pembangunan wilayah sangat berorientasi pada *issues* (permasalahan pokok) wilayah secara terkait, sementara pembangunan sektoral sesuai dengan tugasnya, bertujuan untuk mengembangkan sektor tertentu, tanpa terlalu memperhatikan kaitan dengan sektor-sektor lainnya.

Walaupun dalam konsepnya kedua pendekatan pembangunan tersebut berbeda, namun dalam orientasi keduanya saling melengkapi, dalam arti pembangunan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan sektoral. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada sinergi dalam pembangunan wilayah akan berujung dengan semakin timpangnya pembangunan antar sektor.

Tujuan utama pembangunan wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang ada didalamnya dapat optimal mendukung kehidupan masyarakat (Ambardi, 2002). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bila kita tinjau dengan pendekatan wilayah, maka Kawasan Sentra Produksi adalah bentuk aplikasi dari pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah dimana sinergi menjadi syarat berkembangnya KSP tersebut sehingga aglomerasi pembangunan pertanian yang terjadi akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan petani. Namun apakah konsep pendekatan wilayah dalam pembangunan pertanian melalui KSP secara substantif telah benar-benar dilaksanakan perlu penelitian terkait hal itu.

Dari konsep yang ada, dapat dipahami bahwa Kawasan Sentra Produksi adalah model pembangunan pertanian yang secara konsep sudah mempertimbangkan konsep wilayah, tetapi perlu lebih dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut apakah sudah memberikan hasil pada pembangunan wilayah. Secara lebih khusus, persoalan-persoalan yang hendak diteliti dan diungkapkan pada penelitian ini dirumuskan dalam permasalahan penelitian (*problem question*) sebagai berikut:

1. Mengapa Kecamatan Mungka ditetapkan sebagai Kawasan Sentra Produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah didapatkan keuntungan aglomerasi pada Kawasan Sentra Produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana pengaruh keuntungan aglomerasi, modal dan tenaga kerja terhadap produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di KSP Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?
4. Apa implikasi kebijakan dari hasil studi terhadap Peningkatan Produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di KSP Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan secara detail tentang pendekatan wilayah dalam pembangunan pertanian yang kontekstual. Suatu kajian dari pembangunan wilayah yang didasarkan kepada kegiatan pembangunan ekonomi wilayah secara riil yang seolah-olah ada ketidakjelasan jika dihubungkan dengan konsep dan teori yang sudah ada.

Secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan teori lokasi tentang penetapan Kecamatan Mungka sebagai Kawasan Sentra Produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Mengukur dan menganalisis keuntungan aglomerasi yang diperoleh pada Kawasan Sentra Produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota

3. Mengukur dan menganalisis pengaruh keuntungan aglomerasi, modal dan tenaga kerja terhadap produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di KSP Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menganalisis implikasi kebijakan dari hasil studi terhadap peningkatan produksi ternak unggas (ayam ras petelur) di KSP Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menghasilkan model kebijakan pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah bagi pengembangan Kawasan Sentra Produksi.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan teori ilmu ekonomi regional yang diimplementasikan dalam pembangunan pertanian. Memberikan kontribusi teoritis berupa metode penentuan komoditi unggulan daerah dan model kebijakan pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah. Dimana melalui penelitian ini akan diupayakan untuk menemukan dan memaparkan faktor-faktor yang menjadi syarat bagi terlaksananya pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah (dengan contoh KSP).
3. Dari Penelitian ini juga diharapkan dapat dijelaskan konsep pembangunan pertanian dengan pendekatan wilayah, serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi sektoral dan regional.
4. Perbaikan program pembangunan antar sektor dan antar wilayah, khususnya tata ruang, dan kebijakan pembangunan melalui kegiatan reformulasi atau reimplementasi.

